

Program Studi :
AKUNTANSI

LAPORAN PENELITIAN



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN RSUD SIMPANG LIMA GUMUL
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PPK-BLUD**

Tim Peneliti

Ketua:

Anneke Shierly Frycillia Widodo (19.1.02.01.0094)

Anggota:

1. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak. (0716057101)
2. Erna Puspita, M.Ak. (0711128803)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
NOVEMBER 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan RSUD Simpang Lima Gumul
Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK-BLUD

Ketua Peneliti :

- a. Nama lengkap : Anneke Shierly Frycillia Widodo
- b. NPM : 19.1.02.01.0094
- c. Fak./Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Prodi Akutansi
- d. No. HP : .082335371681
- e. Alamat Surel : annekeshierly@gmail.com

Anggota Peneliti 1 :

- a. Nama lengkap : Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak.
- b. NIDN : 0716057101
- c. Fak./Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Prodi Akutansi


Anggota Peneliti 2 :

- a. Nama lengkap : Erna Puspita, M.Ak.
- b. NIDN : 0711128803
- c. Fak./Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Prodi Akutansi

Lama Penelitian : 3 bulan


Biaya penelitian : Rp 5.000.000,-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Dr. Subagyo, M.M.)
NIDN 0717066601

Kediri, 15 November 2022
Ketua Peneliti



(Anneke Shierly FW)
NPM 19.1.02.01.0094

Menyetujui,
Ketua LPPM



(Dr. KR. Srijati, M.Pd.)
NIDN 0028016701

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
RINGKASAN	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Error! Bookmark not defined.	
B. Error! Bookmark not defined.	
C. Error! Bookmark not defined.	
D. 5	
E. 6	
F. Error! Bookmark not defined.	
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Error! Bookmark not defined.	
B. Error! Bookmark not defined.	
C. Error! Bookmark not defined.	
D. Hipotesis	15
BAB III	15
METODE PENELITIAN.....	15
A. Error! Bookmark not defined.	
B. Error! Bookmark not defined.	
C. Error! Bookmark not defined.	
D. 18	
E. Error! Bookmark not defined.	
F. Error! Bookmark not defined.	
BAB IV	20
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
A. 21	
B. 22	

C.	24
D.	25
BAB IV	28
PENUTUP.....	28
A. Error! Bookmark not defined.	
B. Error! Bookmark not defined.	
DAFTAR PUSTAKA	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pos-Pos dalam Laporan Keuangan RSUD SLG	21
Tabel 2 Rasio Keuangan RSUD SLG Tahun 2019 dan 2020	22
Tabel 3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	23
Tabel 4 Hasil Uji Paired Sample T-Test pada Realisasi Pendapatan	23
Tabel 5 Perbandingan Rasio Keuangan RSUD SLG	24

RINGKASAN

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan sebuah system yang memberi kebebasan pada SKPD untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat dengan tetap memprioritaskan kualitas layanan pada masyarakat. Tujuan diadakannya PPK-BLUD adalah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Status BLUD banyak diterapkan dilingkungan dinas kesehatan baik puskesmas maupun RSUD, salah satunya RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) yang berada di bawah naungan dinas kesehatan Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan RSUD SLG sebelum dan sesudah menerapkan PPK-BLUD. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas beberapa rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, rasiolikuiditas, dan rasio solvabilitas. Metode penelitian menggunakan menggunakan metode kuantitatif komparatif dan pengujian dengan uji *paired sample t-test*. Hasil pengujian statistic menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada kinerja keuangan ditinjau dari besaran pendapatan yang diterima RSUD SLG. Sedangkan rasio keuangan rumah sakit mengalami peningkatan setelah dibandingkan langsung sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan PPK-BLUD pada RSUD SLG membawa dampak positif terhadap kinerja keuangan rumah sakit.

Kata kunci : PPK-BLUD, rasio keuangan, kinerja keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Rumah sakit merupakan sebuah instansi yang bertujuan untuk memberikan jasa layanan kesehatan kepada masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya perbaikan yang harus dilakukan oleh rumah sakit mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, penyediaan tenaga kesehatan yang handal, serta pelayanan yang ramah pada masyarakat. Berdasarkan jenis kepemilikannya, rumah sakit di Indonesia dibagi menjadi rumah sakit milik swasta dan rumah sakit milik pemerintah daerah. Rumah sakit milik pemerintah daerah lebih tepat dikatakan sebagai lembaga non bisnis sehingga kegiatan operasionalnya tidak berorientasi pada laba.

Rumah sakit milik pemerintah daerah menjadi fasilitas kesehatan utama yang paling dibutuhkan masyarakat sehingga rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan layanan kesehatan semaksimal mungkin. Namun, birokrasi pemerintahan yang cenderung rumit menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah (RSUD). RSUD sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki ketergantungan yang besar pada pemerintah daerah khususnya terkait pengelolaan dana yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan operasional rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, SKPD wajib melaporkan kinerja layanan dan kinerja keuangan kepada pemerintah daerah untuk kemudian di konsolidasikan menjadi laporan keuangan daerah. Secara tidak langsung, semua pendapatan yang diterima oleh RSUD yang merupakan bagian dari SKPD menjadi milik pemerintah daerah dan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Dari adanya peraturan tersebut, RSUD mengalami berbagai kesulitan dalam

menjalankan kegiatan operasional yang disebabkan oleh terbatasnya pengelolaan dana yang dapat dilakukan oleh RSUD.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kemudian melakukan reformasi pada sistem dan birokrasi agar pemerintah daerah lebih fleksibel dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang berlandaskan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Salah satu upaya yang kemudian diambil oleh pemerintah untuk memaksimalkan peran RSUD sebagai penyedia jasa layanan kesehatan bagi masyarakat adalah dengan menerbitkan PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Badan Layanan Umum atau disingkat BLU. Adanya peraturan pemerintah tersebut kemudian didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2005 yang sudah diperbaharui dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Berdasarkan Permendagri tersebut, SKPD yang berada dibawah naungan pemerintah daerah wajib menerapkan PPK-BLUD khususnya pada lembaga yang bergerak di bidang jasa layanan kesehatan seperti RSUD dan Puskesmas.

PPK-BLUD merupakan suatu sistem yang memberikan fleksibilitas kepada SKPD dalam mengelola keuangannya dengan menganut prinsiptransparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kesetaraan kewajaran. Menurut Syahromi, (2020), bentuk fleksibilitas yang dimiliki PPK-BLUD antara lain kebebasan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran BLUD, kebebasan mengelola utang dan piutang, kebebasan melakukan investasi dan penerimaan pembiayaan, serta kebebasan dalam melakukan kerjasama. Bentuk kebebasan tersebut dibuktikan dengan adanya hak istimewa yang dimiliki oleh RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD, dimana RSUD tidak wajib menyetorkan pendapatannya ke kas daerah dan memanfaatkan pendapatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat. Hadirnya sistem PPK-BLUD menjadi salah satu bentuk

reformasi ekonomi pada birokrasi yang menitikberatkan pada sistem perencanaan anggaran yang sebelumnya berupa penganggaran tradisional menuju penganggaran berbasis kinerja sehingga pemanfaatan dana anggaran menjadi lebih efisien serta berorientasi pada hasil.

Menurut Susandi (2017) yang telah melakukan penelitian pada RSUD Kabupaten Klungkung memberikan kesimpulan bahwa tidak ada peningkatan kinerja keuangan pada RSUD Kabupaten Klungkung setelah menerapkan PPK-BLUD. Hal ini disebabkan karena pihak manajemen rumah sakit tidak melaksanakan secara optimal peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini terlihat dari penentuan tarif yang belum menggunakan satuan per unit. Selain itu, RSUD tidak melakukan optimalisasi pendapatan jasa layanan yang mengakibatkan tidak adanya penambahan jumlah pendapatan secara signifikan.

Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Chrishartoyo (2017) pada RSUD Moewardi Solo justru menyatakan sebaliknya bahwa penerapan PPK-BLUD memberikan pengaruh positif pada rasio-rasio keuangan RSUD. Pendapatan yang diterima RSUD Moewardi Solo juga mengalami peningkatan yang signifikan serta RSUD mampu memanfaatkan aset lancar dengan lebih baik yang dibuktikan dengan perputaran piutang yang lebih cepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan PPK-BLUD pada RSUD Moewardi Solo dapat meningkatkan kinerja keuangan RSUD.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa hasil penelitian yang cukup bertolak belakang sehingga mendorong peneliti untuk melakukan pengamatan pada RSUD yang sudah berstatus BLUD diluar wilayah yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Rumah sakit yang dipilih sebagai obyek pada penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul. RSUD Simpang Lima Gumul atau RSUD SLG yang terletak di Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Kediri yang terbilang masih baru. Dibangun pada tahun 2011 dan selesai

pada tahun 2016, RSUD SLG resmi beroperasi pada tahun 2018. RSUD SLG menjadi salah satu dari 2 RSUD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kediri yang menjadi penyedia jasa layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kediri bagian selatan meliputi Kecamatan Ngasem, Kecamatan Gurah, Kecamatan Wates, dan sekitarnya. Meski demikian, kinerja rumah sakit sudah terlihat optimal di tahun-tahun awal beroperasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai serta jumlah pasien yang cukup besar berdasarkan data tahunan rumah sakit. Tujuan pemerintah menyediakan fasilitas layanan kesehatan terpadu bagi masyarakat Kabupaten Kediri diwujudkan melalui penetapan BLUD pada RSUD SLG. Sejak diresmikan dan menjadi rumah sakit kelas C, RSUD SLG kini sudah menerapkan PPK-BLUD. Status BLUD disandang oleh RSUD SLG sejak diresmikan tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Kediri nomor 188.45/ 452/ 418.08/ 2018. Meski demikian penerapan PPK-BLUD di RSUD SLG baru disahkan dua tahun kemudian tepatnya di tahun 2020 melalui Surat Keputusan Bupati Kediri nomor 188.45/11/418.08/2020. Perjalanan RSUD SLG sebelum penerapan PPK-BLUD yang hanya satu tahun di awal masa beroperasi menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian terkait perbedaan kinerja keuangan rumah sakit sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD.

Mengingat tujuan pembentukan sistem PPK-BLUD ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada RSUD yang ditinjau dari berbagai aspek salah satunya aspek keuangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan guna membuktikan apakah tujuan pembentukan PPK BLUD ini sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan saat ini. Aspek keuangan menjadi obyek yang diteliti karena PPK-BLUD berkaitan dengan adanya fleksibilitas yang dimiliki RSUD dalam mengelola keuangannya, sehingga kinerja keuangan menjadi objek utama yang diteliti untuk menunjukkan pengaruh fleksibilitas yang dimiliki RSUD

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka perlu menerapkan pembatasan yang terdiri dari:

1. Penggunaan data keuangan terdiri dari 2 tahun sebelum penerapan PPK-BLUD dan 2 tahun sesudah penerapan PPK-BLUD
2. Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yang terdiri dari ROA, dan ROE, Rasio likuiditas yang terdiri dari *quick ratio* dan *current ratio*, serta rasio solvabilitas yang terdiri dari *debt to equity ratio* dan *debt to assets ratio*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, batasan masalah, dan identifikasi masalah tersebut, maka masalah yang akan dikaji pada penelitian ini berupa:

1. Bagaimana kinerja keuangan RSUD SLG ditinjau dari rasio profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD?
2. Bagaimana kinerja keuangan RSUD SLG ditinjau dari rasio likuiditas sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD?
3. Bagaimana kinerja keuangan RSUD SLG ditinjau dari rasio solvabilitas sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD?
4. Bagaimana kinerja keuangan RSUD SLG ditinjau dari realisasi pendapatan sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan rasio profitabilitas RSUD SLG sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD
2. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan rasio likuiditas RSUD SLG sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD
3. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan rasio solvabilitas RSUD SLG sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD
4. Untuk menguji dampak dari penerapan PPK-BLUD pada RSUD SLG terhadap kinerja keuangan ditinjau dari realisasi pendapatan

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kinerja keuangan SKPD khususnya RSUD yang menerapkan PPK BLUD. Sehingga nantinya bagi RSUD lain dapat dijadikan referensi dalam menerapkan PPK BLUD agar mendapat manfaat sebagaimana mestinya

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan khususnya terkait PPK-BLUD dan kinerja keuangan SKPD khususnya RSUD setelah menerapkan PPK-BLUD. Selain itu, hasil penelitian ini dapat pula digunakan sebagai sumber referensi pada penelitian dengan topik sejenis.

F. Luaran Penelitian

1. Informasi ilmiah hasil penelitian ini akan disebarluaskan dengan dipublikasikan pada jurnal Perspektif Akuntansi ISSN : 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online), terindek SINTA 4
2. Laporan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan RSUD Simpang Lima Gumul Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK-BLUD.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani. (2016). Analisis Rasio Likuiditas Dan Rasio Profitabilitas Terhadap Perubahan Laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(7), 1–19.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2047/2054>
- Antara, S., Sepang, J., & Saerang, I. S. (2014). Analisis Rasio Likuiditas, Aktivitas, dan Profitabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan Wholesale yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 902–911.
- Asniwati, A. (2020). Pengaruh rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada PT. Midi Utama Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Economix*, 8(1), 246–257.
- Chrishartoyo, K. A., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). THE ANALYSIS OF FINANCIAL AND NON FINANCIAL PERFORMANCE HOSPITAL BEFORE AND AFTER BLUD (Case Study On Dr. Moewardi General Regional Hospital in 2004-2015). In *Jurnal Ekonomi dan Perbankan* (Vol. 2, Issue 1). www.ombudsman.go.id
- Farwitawati, R. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)*.
- Fernos, J. (2017). ANALISIS RASIO PROFITABILITAS UNTUK MENGUKUR KINERJA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT. *Jurnal Pundi*, 1 (02).
- Indiany, D. F., Rahmatika, D. N., & Waskito, J. (2017). JURNAL ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PPK-BLUD PADA RSUD KARDINAH. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 1(1). <https://doi.org/10.24905/mlt.v1i1.765>
- Irham, F. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Nurliah, N., Mus, A. R., & Dani, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum. *Tata Kelola*, 7(1), 47–

61. <https://doi.org/10.52103/tatakelola.v7i1.79>

Permendagri. (2018). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH*.

Shintia, N. (2017). Analisis Rasio Solvabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Terhadap Asset dan Equity Pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Periode 2012-2015. *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(1), 41–63.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT Alfabet.

Susandi, N. T., Budiarta, K., & Suprasto, H. B. (2017). KINERJA KEUANGAN DAN EFISIENSI PROSES INTERNAL SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PPK-BLUD PADA RSUD KAB.KLUNGKUNG. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* (Vol. 6).

Syahromi, M. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2839–2860.

Widiyanti. (2014). ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, RASIO SOLVABILITAS, RASIO AKTIFITAS DAN RASIO PROFITABILITAS PADA PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk DAN PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, Tbk. *Jurnal Jembatan*, 11(1), 31–44.

Winarso, A. N. A. (2018). NALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN SESUDAH PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA RSUD IDAMAN BANJARBARU KOTA BANJARBARU. *Jurnal Kindai*, 14 (3), 286–300.